



DINAS KOMINFO

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RANCANGAN RENJA 2026

DINAS KOMINFO KAB.TANJUNG JABUNG BARAT

**Alamat : Jl. Beringin, Komp.
Perkantoran Kuala Tungkal 36513**
Email : diskominfo@tanjabbarakab.go.id
Website : www.tanjabbarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026 ini menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sekaligus sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD).

Kami berharap Rancangan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berguna dalam pencapaian target pembangunan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 28 November 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
19810829 201001 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
 DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	7
2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Tahun 2024	12
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJM, RENSTRA dan RKA	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
4.1 Program dan Kegiatan.....	43
4.2 Rumusan Rencana Pendanaan.....	46
 BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANCANGAN RENJA-PD) Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renja 2026 dimulai dengan persiapan penyusunan, mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rancangan RKPD;
- b. Rumusan program / kegiatan di dalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rancangan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program / kegiatan didalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Rancangan Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola an Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi pada tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengevaluasi RENJA Dinas Kominfo tahun sebelumnya;
2. Sebagai salah satu acuan penyusunan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2026;
3. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2026;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kominfo Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

	2.2	Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
	2.3	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4	Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA
	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1	Program dan Kegiatan
	4.2	Rumusan Rencana Pendanaan
BAB V		PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI

TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (Kondisi per Bulan Oktober 2024)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ditinjau dari Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024
(Bulan Oktober 2024)

NO.		URAIAN				Sudah / Belum Mencapai Target
1.	PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH	DAN
	KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tercapai
	Anggaran	20.300.000				
	Realisasi	17.300.000				
	Persentase Realisasi	85,22%				
2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tercapai
	Anggaran	58.850.000				
	Realisasi	45.850.000				
	Persentase Realisasi	77,91%				
3.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Belum Tercapai
	Anggaran	29.200.000				
	Realisasi	20.000.000				
	Persentase Realisasi	68,49%				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Belum Tercapai
	Anggaran	3.302.752.349				
	Realisasi	2.431.044.664				
	Persentase Realisasi	73,61%				
5.	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN				Tercapai
	Anggaran	229.200.000				
	Realisasi	191.000.000				

	Persentase Realisasi	83,33%	
6.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapai
	Anggaran	44.240.000	
	Realisasi	35.000.000	
	Persentase Realisasi	79,11%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7.	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapai
	Anggaran	60.000.000	
	Realisasi	58.900.000	
	Persentase Realisasi	98,17%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapai
	Anggaran	4.463.750	
	Realisasi	4.383.000	
	Persentase Realisasi	98,19%	
9.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Anggaran	62.153.000	
	Realisasi	57.318.858	
	Persentase Realisasi	92,22%	
10.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapai
	Anggaran	18.000.000	
	Realisasi	15.780.000	
	Persentase Realisasi	87,67%	
11.	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapai
	Anggaran	21.800.000	
	Realisasi	21.379.000	
	Persentase Realisasi	98,07%	
12.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belum Tercapai
	Anggaran	6.000.000	
	Realisasi	00	
	Persentase Realisasi	0,00%	
13.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapai
	Anggaran	559.482.200	
	Realisasi	452.326.348	
	Persentase Realisasi	80,85%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14.	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belum Tercapai

	Anggaran	51.063.000	
	Realisasi	31.663.000	
	Persentase Realisasi	62,01%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
15.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapai
	Anggaran	3.500.000	
	Realisasi	3.135.811	
	Persentase Realisasi	89,59%	
16.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapai
	Anggaran	88.877.000	
	Realisasi	74.695.999	
	Persentase Realisasi	84,04%	
17.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapai
	Anggaran	96.000.000	
	Realisasi	72.288.154	
	Persentase Realisasi	75,30%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
18.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapai
	Anggaran	173.710.400	
	Realisasi	146.632.670	
	Persentase Realisasi	84,41%	
19.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapai
	Anggaran	36.270.000	
	Realisasi	31.540.000	
	Persentase Realisasi	86,96%	
20.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belum Tercapai
	Anggaran	158.955.000	
	Realisasi	89.379.917	
	Persentase Realisasi	56,23%	
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
21.	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Belum Tercapai
	Anggaran	51.315.000	
	Realisasi	25.500.000	
	Persentase Realisasi	49,69%	
22.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tercapai

	Anggaran	115.600.000		
	Realisasi	95.500.000		
	Persentase Realisasi	82,61%		
23.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Tercapai
	Anggaran	44.320.000		
	Realisasi	35.500.000		
	Persentase Realisasi	80,10%		
24.	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik		Tercapai
	Anggaran	49.020.000		
	Realisasi	38.250.000		
	Persentase Realisasi	78,03%		
25.	Sub Kegiatan	Layanan Hubungan Media		Tercapai
	Anggaran	2.652.650.000		
	Realisasi	2.093.150.094		
	Persentase Realisasi	78,91%		
26.	Sub Kegiatan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Tercapai
	Anggaran	400.290.000		
	Realisasi	356.930.000		
	Persentase Realisasi	89,17%		
27.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Belum Tercapai
	Anggaran	52.916.000		
	Realisasi	23.250.000		
	Persentase Realisasi	43,94%		
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
28.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Tercapai
	Anggaran	2.667.683.000		
	Realisasi	2.017.360.000		
	Persentase Realisasi	75,62%		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
29.	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Belum Tercapai
	Anggaran	95.000.000		
	Realisasi	75.000.000		
	Persentase Realisasi	78,95%		
30.	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Tercapai
	Anggaran	70.100.000		
	Realisasi	65.000.000		

	Persentase Realisasi	92,72%			
31.	Sub Kegiatan	Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO)			Tercapai
	Anggaran	53.800.000			
	Realisasi	40.500.000			
	Persentase Realisasi	75,28%			
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
32.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora			Tercapai
	Anggaran	82.600.000			
	Realisasi	70.300.000			
	Persentase Realisasi	85,11%			
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
33.	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Belum Tercapai
	Anggaran	47.350.000			
	Realisasi	35.500.000			
	Persentase Realisasi	74,97%			

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas memperlihatkan bahwa mayoritas pelaksanaan program/ kegiatan telah mencapai target realisasi di atas 75%, walaupun masih terdapat tiga sub kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya berada dibawah 50%.

- Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Serapan anggaran: 68,49%
Alasan: Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Serapan anggaran: 73,61%
Alasan: Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan perbulan
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Serapan anggaran: 00,00%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan untuk langganan surat kabar dilaksanakan di akhir tahun anggaran.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Serapan anggaran: 62,01%

Alasan: Sebagian kegiatan ini baru diusulkan dalam APBD-P 2024 dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Serapan anggaran: 56,23%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan rehab Gedung kantor baru dianggarkan di APBD-P 2024, saat ini sedang proses pelaksanaan pekerjaan.

6. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

Serapan anggaran: 49,69%

Alasan: Belum terlaksananya Sosialisasi SP4N-LAPOR yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember.

7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Serapan anggaran: 43,94%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan di bulan november namun belum tercatat dalam laporan realisasi anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang anggarannya berupa honorarium tim pelaksana kegiatan. Program atau kegiatan dapat tercapai sesuai anggaran namun pencapaian target Perjanjian Kinerja OPD tidak Optimal, sehingga dilakukan perubahan target.

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 20.580.000

A.2 Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 59.795.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 29.160.000

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 3.294.621.843

B.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 230.400.000

B.3 Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 44.400.000

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

C.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Prediksi : 100%

Anggaran : 60.900.000

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

D.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prediksi : 100%

Anggaran : 4.393.500

D.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Prediksi : 100%

Anggaran : 62.024.000

D.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Prediksi : 100%

Anggaran : 16.477.350

D.4 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Prediksi : 100%

Anggaran : 19.450.000

D.5 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prediksi : 100%

Anggaran : 5.000.000

D.6 Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 457.611.400

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

E.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prediksi : 100%

Anggaran : 3.000.000

E.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prediksi : 100%

Anggaran : 84.984.000

E.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Prediksi : 100%

Anggaran : 92.379.200

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

F.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Prediksi : 100%

Anggaran : 11.800.000

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

G.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Prediksi : 100%
Anggaran : 177.338.000

F.2 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prediksi : 100%
Anggaran : 30.830.000

F.3 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Prediksi : 100%
Anggaran : 24.000.000

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Prediksi : 100%
Anggaran : 50.932.000

A.2 Sub Kegiatan:

- Penyusunan Konten
Prediksi : 100%
Anggaran : 172.136.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Prediksi : 100%
Anggaran : 44.384.000

A.4 Sub Kegiatan:

- Pelayanan Informasi Publik
Prediksi : 100%
Anggaran : 49.170.000

A.5 Sub Kegiatan:

- Relasi Media
Prediksi : 100%
Anggaran : 2.418.550.000

A.6 Sub Kegiatan:

- Diseminasi Informasi
Prediksi : 100%

Anggaran : 278.490.000

A.7 Sub Kegiatan:

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Prediksi : 100%

Anggaran : 53.042.000

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Prediksi : 100%

Anggaran : 53.800.000

A.2 Sub Kegiatan:

- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Prediksi : 100%

Anggaran : 95.000.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Prediksi : 100%

Anggaran : 2.716.344.000

A.4 Sub Kegiatan:

- Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Prediksi : 100%

Anggaran : 70.099.800

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

Prediksi : 100%

Anggaran : 36.285.000

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Prediksi : 100%

Anggaran : 46.980.000

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 2 Januari s.d 30 September 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021- 2023)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab						
							I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600%	114.824.711.401	300%	30.744.869.978	100%	11.405.470.699	11,62%	1.324.788.748	31,57%	3.600.482.475	19,77%	2.254.435.780	0,00%	-	62,95%	7.179.707.003	362,95%	37.924.576.981	60%	33,03%	Diskominfo
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas kinerja aparatur dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600%	37.456.037.551	300%	14.357.885.818	100%	5.022.826.699	15,81%	794.018.748	31,45%	1.579.832.381	21,17%	1.063.560.780	0,00%	-	68,44%	3.437.411.909	368,44%	17.795.297.727	61%	47,51%	Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		600%	666.520.000	300%	127.127.250	100%	108.350.000	23,49%	25.450.000	29,26%	31.700.000	18,00%	19.500.000	0,00%	-	70,74%	76.650.000	370,74%	203.777.250	62%	30,57%	Diskominfo

		Perangk at Daerah																					
		Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	30	371.520.000	10	127.127.250	5	58.850.000	1	14.950.000	2	18.900.000	1	9.000.000	0	4	42.850.000	14	169.977.250	47%	45,75%	Diskominfo
		Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	120.000.000	0	-	2	20.300.000	1	4.500.000	1	6.800.000	0	4.500.000	0	2	15.800.000	2	15.800.000	20%	13,17%	Diskominfo
		Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	175.000.000	4	34.000.000	4	29.200.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	0	3	18.000.000	7	52.000.000	44%	29,71%	Diskominfo
		Administ rasi Keuangan Perangk at Daerah		600%	24.743.464.894	300%	11.238.974.846	100%	3.576.192.349	15,54%	555.592.549	30,17%	1.078.831.162	21,68%	775.206.718	0,00%	67,38%	2.409.630.429	367,38%	13.648.605.275	61%	55,16%	Diskominfo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	23.308.044.894	24	10.624.024.946	12	3.302.752.349	3	492.142.549	3	1.006.681.162	3	707.406.718	0	9	2.206.230.429	33	12.830.255.375	46%	55,05%	Diskominfo

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	960.320.000	24	477.400.000	12	229.200.000	3	52.950.000	3	61.650.000	3	57.300.000	0	,	9	171.900.000	33	649.300.000	275%	67,61%	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	10	275.100.000	4	137.549.900	2	44.240.000	1	10.500.000	1	10.500.000		10.500.000	0	,	2	31.500.000	6	169.049.900	60%	61,45%	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	,	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600%	582.500.000	300%	51.000.000	100%	60.000.000	0,00%	-	98,17%	0,00%	-	0,00%	-	98,17%	58.900.000	398,17%	109.900.000	66%	18,87%	Diskominfo	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60	157.500.000	120	51.000.000	60	60.000.000	0	-	58	0	-	0	-	58	58.900.000	178	109.900.000	297%	69,78%	Diskominfo	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	600%	5.027.621.692	300%	1.802.590.292	100%	669.908.950	17,64%	118.140.477	28,05%	187.937.461	24,02%	160.917.397	0,00%	-	69,71%	466.995.335	369,71%	2.269.585.627	62%	45,14%	Diskominfo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayarnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	28.044.106	16	11.044.007	8	4.463.750	3	2.108.000	0	-	5	2.275.000	0	-	8	4.383.000	24	15.427.007	300%	55,01%	Diskominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	50	255.000.027	100	121.349.791	50	62.153.000	20	27.522.158	0	-	30	29.796.700	0	-	50	57.318.858	150	178.668.649	300%	70,07%	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	2	131.400.000	140	42.200.000	2	16.010.000	1	1.200.000	1	11.497.900	0	1.380.000	0	-	2	14.077.900	142	56.277.900	7100%	42,83%	Diskominfo
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8	131.561.532	16	62.031.144	8	21.800.000	0	-	4	15.596.000	4	5.783.000	0	-	8	21.379.000	24	83.410.144	300%	63,40%	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	45.000.000	14	18.000.000	7	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	18.000.000	200%	40,00%	Diskominfo

		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12	4.316.616.027	24	1.547.965.350	12	559.482.200	3	87.310.319	3	160.843.561	3	121.682.697	0	-	9	369.836.577	33	1.917.801.927	275%	44,43%	Diskominfo
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600%	2.925.000.000	300%	255.419.626	0,00%	51.063.000	0,00%	62,01%	0,00%	31.663.000	0,00%	0,00%	62,01%	362,01%	31.663.000	287.082.626	60%	9,81%	Diskominfo		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15	700.000.000	3	66.652.900	15	51.063.000	0	-	10	31.663.000	0	-	10	-	31.663.000	13	98.315.900	87%	14,05%	Diskominfo	
		Pengadaan Mebel		25	225.000.000	14	23.294.726	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	14	23.294.726	56%	10,35%	Diskominfo	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1.200.000.000	1	18.472.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	1	18.472.000	100%	1,54%	Diskominfo	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		20	800.000.000	3	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	3	30.000.000	15%	3,75%	Diskominfo	

		Monitorin g Informasi dan Penetapa n Agenda Prioritas Komunik asi Pemerint ah Daerah	Terlaksanany a Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	Diskominfo
		Pengelol aan Media Komunik asi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	4	385.100.000	4	118.300.000	4	44.320.000	1	10.650.000	1	10.650.000	0	10.650.000	3	31.950.000	7	150.250.000	175%	39,02%	Diskominfo
		Pelayana n Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	4	294.818.000	4	133.452.000	4	49.020.000	1	11.475.000	1	11.475.000	0	11.475.000	3	34.425.000	7	167.877.000	175%	56,94%	Diskominfo
		Penyelen ggaraan Hubunga n Masyarak at, Media dan Kemitraa n Komunita s	Terselenggara nya Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4	250.000.000	4	54.999.800	4	52.916.000	1	6.975.000	1	6.975.000	0	6.975.000	3	20.925.000	7	75.924.800	175%	30,37%	Diskominfo
		Monitorin g Informasi dan Penetapa n Agenda Prioritas Komunik asi Pemerint ah Daerah	Terselenggara nya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Pengelol aan Konten dan Perencana aan	Terselenggara nya Pengelolan Konten dan Perencanaan Media	12	553.800.000	3	109.200.000	4	115.600.000	1	28.650.000	1	28.650.000	0	28.650.000	3	85.950.000	6	195.150.000	50%	35,24%	Diskominfo

		Media Komunik asi Publik	Komunikasi Publik																					
		Layanan Hubunga n Media	Terselenggara nya Layanan Hubungan Media	4	41.847.000.000	4	7.682.950.000	4	2.652.650.000	1	286.650.000	1	1.029.200.094	1	359.650.000	0	,	3	1.675.500.094	7	9.358.450.094	175%	22,36%	Diskominfo
		Kemitraa n dengan Pemangk u Kepentin gan	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik	2.590	3.824.290.850	500	1.248.607.700	500	400.290.000	120	68.480.000	140	121.850.000	110	53.060.000	0	,	370	243.390.000	870	1.491.997.700	34%	39,01%	Diskominfo
		Penguata n Kapasitas Sumber Daya Komunik asi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	8	240.000.000	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0%	0,00%	Diskominfo
		Penyedia an/Peng adaan Sarana dan Prasaran a Penduku ng Informas i dan Komunik asi Publik Pemerint ah Kabupat en Kota		600%	1.233.400.000	0,00%	280.000.000	0,00%	,	0,00%	,	0,00%	,	0,00%	,	0,00%	,	0,00%	,	280.000.000	0%	22,70%	Diskominfo	
		Penyedia an/Penga daan Sarana dan Prasaran a Penduku ng Informas i dan Komunik	Jumlah Penyediaan/P engadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	7	1.233.400.000	0	280.000.000	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0	,	0	280.000.000	0%	22,70%	Diskominfo

		asi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																					
3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		600%	22.627.390.000	300%	6.191.475.320	100%	2.886.583.000	3,24%	93.440.000	25,55%	737.600.000	24,11%	695.965.000	0,00%	-	52,90%	1.527.005.000	352,90%	7.718.480.320	59%	34,11%	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	264	19.021.790.000	44	6.191.475.320	44	2.886.583.000	3,24%	93.440.000	25,55%	737.600.000	24,11%	695.965.000	0,00%	-	52,90%	1.527.005.000	4452,90%	7.718.480.320	17%	40,58%	Diskominfo
		Penyenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi	44	19.021.790.000	44	5.138.205.720	44	2.667.683.000	44	46.000.000	44	649.500.000	44	664.465.000	0	-	132	1.359.965.000	176	6.498.170.720	400%	34,16%	Diskominfo
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600%	3.605.600.000	300%	854.904.314	100%	218.900.000	21,67%	47.440.000	40,25%	88.100.000	14,39%	31.500.000	0,00%	-	76,31%	167.040.000	376,31%	1.021.944.314	63%	28,34%	Diskominfo

		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	4	800.000.000	0		0		0		0		0		0	44		44		1100%	0,00%	Diskominfo
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	44	281.100.000	0	46.850.000	0		0		0		0		0	44		44	46.850.000	100%	16,67%	Diskominfo
		Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tercapainya Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44	286.200.000	44	61.700.000	0		0		0		0		0	13		57	61.700.000	130%	21,56%	Diskominfo
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	44	1.155.100.000	44	439.420.000	44	95.000.000	44	22.500.000	44	22.500.000		0		132	67.500.000	176	506.920.000	400%	43,89%	Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	44	669.600.000	44	349.899.800	44	70.100.000	44	4.000.000	44	58.000.000		0		132	65.000.000	176	414.899.800	400%	61,96%	Diskominfo

		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44	413.600.000	44	155.399.800	44	53.800.000	44	20.940.000	44	7.600.000	44	6.000.000	0	-	132	34.540.000	176	189.939.800	400%	45,92%	Diskominfo
4		PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		600%	1.250.000.000	300%	82.200.000	100%	82.600.000	7,45%	6.150.000	67,74%	55.950.000	7,45%	6.150.000	0,00%	-	82,63%	68.250.000	382,63%	150.450.000	64%	12,04%	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	600%	1.250.000.000	300%	82.200.000	100%	82.600.000	7,45%	6.150.000	67,74%	55.950.000	7,45%	6.150.000	0,00%	-	82,63%	68.250.000	382,63%	150.450.000	64%	12,04%	Diskominfo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44	1.250.000.000	44	82.200.000	44	82.600.000	44	6.150.000	44	55.950.000	44	6.150.000	0	-	132	68.250.000	176	150.450.000	400%	12,04%	Diskominfo
5		PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGEMANGAN INFORMASI		600%	1.000.000.000	300%	103.004.714	100%	47.350.000	22,49%	10.650.000	22,49%	10.650.000	22,49%	10.650.000	0,00%	-	67,48%	31.950.000	367,48%	134.954.714	61%	13,50%	Diskominfo

		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%		300%	103.004.714	100%		22,49%	10.650.000	22,49%	10.650.000	22,49%	10.650.000	0,00%		67,48%		367,48%		134.954.714	61%	13,50%	Diskominfo
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44	500.000.000	44	103.004.714	44	47.350.000	44	10.650.000	44	10.650.000	44	10.650.000	0		132		176		134.954.714	400%	26,99%	Diskominfo
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0		0		-	0%	0,00%	Diskominfo
		Rata-rata capaian kinerja (%)																61,14%							
		Predikat Kinerja																Rendah							

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Renja tahun 2026 merupakan tahun kelima perencanaan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 sebagian besar sesuai dengan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 dan secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3
Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayananan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	82	82	82	82
			Nilai AKIP Diskominfo	60	65	70	71	72	75

Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut :

1. Formulasi pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah
- a. Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik. Perbandingan Selisih Antara Jumlah Lembaga komunikasi Publik yang berpartisipasi aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga yang terverifikasi Lalu Dikali Seratus Persen. Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga komunikasi Publik yang berpsipasi aktif}}{\text{Jumlah Lembaga yang terverifikasi}} \times 100\%$$

- b. Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government adalah Perbandingan antara Jumlah Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi e-Goverment dengan Jumlah Jumlah OPD Kab. Tanjab Barat dikali seratus persen. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi e-}}{\text{Jumlah OPD Kab. Tanjab Barat}} \times 100\%$$

- 2. Formulasi pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayananan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan adalah
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Perbandingan antara Total Nilai dasar persepsi per unsur dengan Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

$$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

- b. Nilai AKIP Diskominfo adalah Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu penting dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu penting ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permsalahan-permasalahan yang terjadi.

2.4.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2024, masih belum dikatakan dapat tercapai semua nya. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya dukungan anggaran dari Pemerintah,

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya SDM yang berkemampuan dalam urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

2.4.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat berdasarkan masing-masing urusan yaitu:

a. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
- 3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
- 4) Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
- 5) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.
- 8) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.

b. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral.
- 2) Belum terbangunnya sistem big data.
- 3) Belum tersedianya tenaga yang berkompeten di bidang statistik.
- 4) Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan statistik sektoral.

c. Urusan Persandian

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
- 2) Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan pengamanan informasi.
- 4) Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang persandian atau pengamanan informasi.

2.4.3 Dampak Terhadap Capaian Pemerintah Pusat dan Daerah

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat. Sehingga membuat misi yang ditetapkan Kepala

Daerah belum tercapai. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SPM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus di dukung oleh Pemerintah Daerah.

2.4.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan:

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Jaminan keamanan sistem TIK

Peluang:

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

2.4.5 Penentuan Isu-Isu Penting

Isu penting merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu penting yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi e-government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.

2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral.
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat. Maka tujuan pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai yaitu: Menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK Nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dari sasaran-sasaran tersebut maka arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional. Dalam hal ini kaitannya dengan penyediaan infrastruktur internet publik dan peningkatan sarana dan prasarana TIK untuk masyarakat.
2. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan. Dalam hal ini memajukan perekonomian masyarakat yang lebih inovatif dan berteknologi tinggi melalui penggunaan sarana dan prasarana TIK.
3. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi. Hal ini kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat menuju Tanjung Jabung Barat Smart City.
4. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian berita atau informasi

publik mengenai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat melalui media dan website resmi pemerintah.

5. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam hal ini berkaitan dengan data-data sektoral Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat yang disusun dalam sebuah dokumen.
6. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memanfaatkan wadah yang ada di masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA

Upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat periode 2021 s.d 2026 yaitu Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung **Misi III** yaitu: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa program. Adapun program yang disusun selaras antara RPJMD, RENJA dan RKA untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Program, Indikator dan Target RPJMD, RENJA dan RKA Tahun 2024

VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Untuk Pelayanan Publik.

No.	Program RPJMD	Indikator	Target Kinerja	Program Renja	Indikator	Target Kinerja	Program RKA	Indikator	Target Kinerja
Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik									
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD	Program Penyelenggaran Statistik Sektor	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%	Program Penyelenggaraann Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan uraian dan implementasi dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut: Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
2. Terselenggaranya penyediaan jaringan interkoneksi pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatnya layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan dukungan pendanaan yang memadai.
5. Meningkatnya diseminasi data statistik sektoral dan mutu statistik daerah yang terintegrasi
6. Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

4. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
8. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENJA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENSTRA.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Renja 2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik	100%	100%
			Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayananan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82
			Nilai AKIP Diskominfo	71	71

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komunikasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Layanan Hubungan Media
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

			Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2026 program dan kegiatan telah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 diantaranya:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Untuk Menunjang program-program diatas, Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan untuk Tahun 2026 yaitu:

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

		3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2) Pengadaan Mebel 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

		2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5) Pelayanan Informasi Publik 6) Layanan Hubungan Media 7) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 8) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 9) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 10) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10.	Kegiatan Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 6) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	

	Sub Kegiatan :	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rumusan Rencana Pendanaan

Program / kegiatan akan berjalan sesuai tujuan dan sasaran dengan dukungan dalam penganggaran. Pendanaan pada setiap program / kegiatan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai. Adapun Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	DISKOMINFO	100%	7.126.791.071	APBD		100% 6.523.791.071
	1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	DISKOMINFO	65 Kategori	126.920.000	APBD		70 Kategori 126.920.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMINFO	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen 30.000.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOMINFO	5 Laporan	61.920.000	APBD		5 Laporan 61.920.000
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOMINFO	4 Laporan	35.000.000	APBD		4 Laporan 35.000.000

	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun	DISKOMINFO	100%	4.279.444.149	APBD		100%	4.194.444.149
	4	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	DISKOMINFO	32 Orang/Bulan	3.943.594.149	APBD		35 Orang/Bulan	3.938.594.149
	5	<i>Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	DISKOMINFO	12 Dokumen	250.000.000	APBD		12 Dokumen	170.000.000
	6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	DISKOMINFO	2 Laporan	45.850.000	APBD		2 Laporan	45.850.000
	7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	DISKOMINFO	3 Laporan	40.000.000	APBD		3 Laporan	40.000.000
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISKOMINFO	100%	185.000.000	APBD		100%	112.000.000
	8	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	DISKOMINFO	60 Paket	100.000.000	APBD		60 Paket	27.000.000
	9	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	DISKOMINFO	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3 Dokumen	35.000.000
	10	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	DISKOMINFO	10 Orang	50.000.000	APBD		10 Orang	50.000.000

	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	DISKOMINFO	100%	960.926.922	APBD		100%	960.926.922
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	8 Paket	5.000.000	APBD		8 Paket	5.000.000
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	50 Paket	45.000.000	APBD		50 Paket	45.000.000
	13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	2 Paket	25.000.000	ABPD		2 Paket	25.000.000
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISKOMINFO	8 Paket	21.926.922	ABPD		8 Paket	21.926.922
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISKOMINFO	7 Dokumen	9.000.000	ABPD		7 Dokumen	9.000.000
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	12 Laporan	825.000.000	ABPD		12 Laporan	825.000.000
	17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISKOMINFO	12 Dokumen	30.000.000	ABPD		12 Dokumen	30.000.000
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	100%	760.000.000	APBD		100%	410.000.000
	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	15 unit	500.000.000	APBD		15 Unit	150.000.000

19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISKOMINFO	25 Unit	60.000.000	APBD		25 unit	60.000.000
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	1 Unit	0	ABPD		0	0
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	20 Unit	200.000.000	ABPD		20 Unit	200.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung kendaraan Dinas	DISKOMINFO	8 Unit	0				-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	DISKOMINFO	100%	224.500.000	ABPD		100%	129.500.000
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISKOMINFO	12 Laporan	4.500.000	APBD		12 Laporan	4.500.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	85.000.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	120.000.000	ABPD		12 Laporan	40.000.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	DISKOMINFO	100%	590.000.000	ABPD		100%	590.000.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISKOMINFO	20 Unit	150.000.000	ABPD		20 Unit	150.000.000

	26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DISKOMINFO	30 Unit	40.000.000	APBD		30 Unit	40.000.000
	27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISKOMINFO	1 Unit	400.000.000	APBD		1 Unit	400.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	II.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	DISKOMINFO	4 Media	10.205.000.000	APBD		4 Media	10.205.000.000
	II.8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	DISKOMINFO	4 Media	10.205.000.000	APBD		4 Media	10.205.000.000
	28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	65.000.000	APBD		4 Dokumen	65.000.000
	29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	10 Dokumen	150.000.000	APBD		10 Dokumen	150.000.000
	30	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	3 Dokumen	138.450.000	APBD		3 Dokumen	138.450.000

31	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	45.000.000	APBD		4 Dokumen	45.000.000
32	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	DISKOMINFO	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
33	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	DISKOMINFO	4 Layanan	8.886.550.000	APBD		4 Layanan	8.886.550.000
34	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	DISKOMINFO	500 Dokumen	700.000.000	APBD		500 Dokumen	700.000.000
35	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	DISKOMINFO	8 Orang	0	APBD		8 Orang	0
36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	DISKOMINFO	4 Dokumen	70.000.000	APBD		4 Dokumen	70.000.000
37	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	7 Unit	100.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000
III.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	DISKOMINFO	44 Unit	4.088.650.000	APBD		44 Unit	4.088.650.000
III.9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000

	38	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000
	III.10	Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	DISKOMINFO	44 Unit	588.650.000	APBD		44 Unit	588.650.000
	39	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	DISKOMINFO	44 Dokumen	200.000.000	APBD		44 Dokumen	200.000.000
	40	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	DISKOMINFO	44 Unit	46.850.000	APBD		44 Unit	46.850.000
	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	DISKOMINFO	13 Perangkat Daerah	47.700.000	APBD		13 Perangkat Daerah	47.700.000
	42	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	DISKOMINFO	5 Unit	125.000.000	APBD		5 Unit	125.000.000
	43	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	12 Dokumen	99.100.000	APBD		12 Dokumen	99.100.000
	44	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	DISKOMINFO	12 Dokumen	70.000.000	APBD		12 Dokumen	70.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

	IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
	IV.11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
	45	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	250.000.000	APBD		4 Dokumen	250.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</i>	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
	V.12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat keamanan informasi pemerintah</i>	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
	46	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	DISKOMINFO	13 Laporan	100.000.000	APBD		13 Laporan	100.000.000
	47	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	DISKOMINFO	44 Perangkat Daerah	100.000.000	APBD		44 Perangkat Daerah	100.000.000
JUMLAH TOTAL						Rp 21.870.441.071,00				Rp 21.267.441.071,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, aturan perundang-undangan dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kuala Tungkal, 28 November 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

19810829 201001 1 010